

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus, Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
Dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
7. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kuningan.
8. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kuningan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
 1. Sekretariat :
 - a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISDASI

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 9

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 10

Rincian uraian tugas, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Pertama

Kepegawaian

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 13

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. Iuran Anggota KORPRI yang disesuaikan dengan hasil Musyawarah KORPRI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 25-8-2010

BUPATI KUNINGAN

TTD

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 27-8-2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

TTD

NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 114 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Pada awalnya motivasi membentuk organisasi KORPRI melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 adalah sebagai upaya menjamin keutuhan dan kekompakan PNS pasca politisasi birokrasi era Orde Lama. Bergulirnya reformasi bulan Mei 1998 yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, di dalamnya tercantum pasal yang mengatur larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota atau pengurus partai politik, menyebabkan adanya tuntutan masyarakat maupun di kalangan PNS sendiri untuk meninjau kembali keberadaan KORPRI.

Tuntutan itu mau tidak mau harus didukung dengan kemauan politik (political will) yang kuat, karena tuntutan zaman yang sudah berubah untuk mengembalikan KORPRI menjadi organisasi profesi PNS. Sebagian besar anggota KORPRI terutama PNS belum memahami

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Dalam konteks organisasi KORPRI, PNS yang jumlah sangat besar, membutuhkan organisasi dalam rangka backup-ing baik pada kadar keformalan maupun informal. Keformalan dalam kaitan atau hubungannya dengan "tugas, kerja, kinerja" dan informal dalam kaitannya dengan "emotional relationship". Dalam hal ini, wadah organisasi yang namanya KORPRI dapat bertindak atau berperan sebagai "driving forces". Pada sisi lain, dari perspektif administrasi negara, organisasi Korpri mempunyai kedudukan yang strategis karena beberapa faktor:

1. PNS sebagai anggota Korpri merupakan sumberdaya (élan vital) birokrasi pemerintahan;
2. Korpri adalah mitra kerja pemerintah, sehingga Korpri diharapkan dapat menjadi pengarah yang baik dalam meningkatkan mutu sistem birokrasi; dan
3. Korpri merupakan satu-satunya wadah pembinaan yang tidak terpisahkan dari kedinasan, menghimpun dan membina PNS.

Dari kedudukan, peran strategis dan fungsinya tersebut, jelaslah bahwa keberadaan organisasi KORPRI menjadi keniscayaan jika ingin birokrasi berjalan dengan baik. Dengan kata lain, jika pengurus KORPRI yang baru dapat mengelola organisasi KORPRI sesuai dengan kedudukan, peran strategis dan fungsinya tersebut, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa KORPRI kurang atau tidak bermanfaat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kuningan selama ini diberikan jabatan struktural yang disetarakan dengan tingkat eselonering diatur dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KLP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten / Kota, tingkat eselonering jabatan struktural Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten tidak lagi berstatus disetarakan, tetapi memiliki eselonering yang pasti yaitu eselon III/b.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 dimaksud, Pendanaan Penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

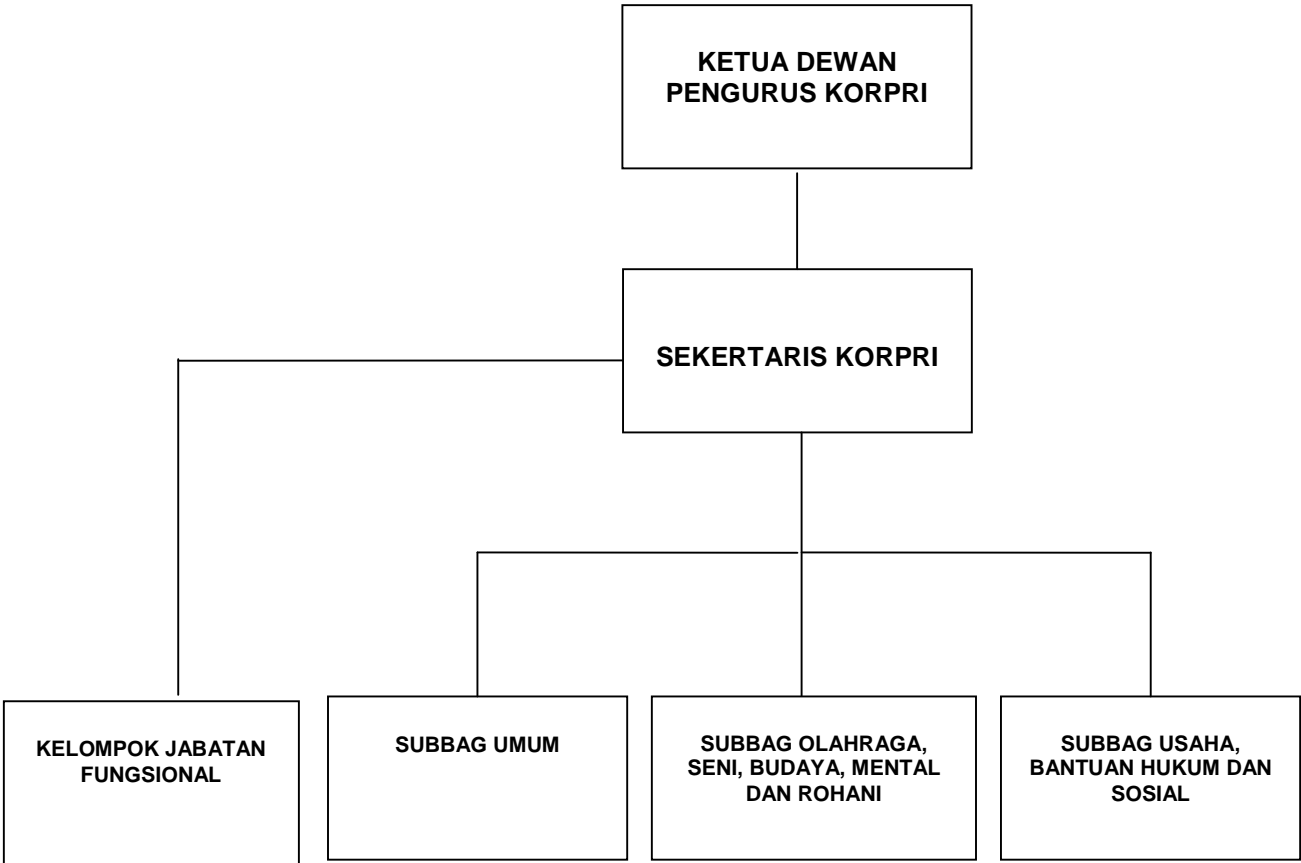
Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 20

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 28-8-2010
TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN
TTD
AANG HAMID SUGANDA